

Debat Capres Mencurigakan

INDO POS - 14 Jan '19.

Ada Kesepakatan Kedua Paslon Batasi Pertanyaan

JAKARTA-Adanya kesepakatan antara KPU dan kedua pasangan calon untuk membatasi pertanyaan terkait HAM dalam debat Capres akan memancing kecurigaan publik. Sebab, pembatasan pertanyaan itu bisa diartikan ada ketakutan dari kedua paslon bahwa mereka terlibat atau tidak mampu mengatasi masalah HAM tersebut.

Menurut pakar hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, Feri Amsari, kesepakatan membatasi pertanyaan untuk kasus spesifik dalam segmen terbuka debat Capres putaran pertama hanya akan menimbulkan kecurigaan.

"Kalau diatur dan ada kesepakatan supaya ada kasus-kasus yang tidak boleh disinggung dalam segmen terbuka justru akan menimbulkan kecurigaan bagi publik," ujar Feri ketika dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Feri mengaku menyesalkan adanya kesepakatan pembatasan pertanyaan secara spesifik di dalam debat terbuka. "Masyarakat malah akan curiga, jangan-jangan kasus itu memang melibatkan atau kegagalan Paslon dalam mengatasi kasus-kasus tersebut," ucap Feri.

Lebih lanjut Feri mengatakan debat Capres secara terbuka seharusnya digunakan oleh para pasangan calon untuk menjawab pertanyaan terkait kasus-kasus itu agar prasangka publik terhadap masing-masing pasangan calon atas isu-isu tertentu bisa terselesaikan.

"Sayang sekali bagi Capres kalau tidak bisa menggunakan kesempatan itu untuk memberikan klarifikasi terhadap isu-isu tertentu," tambah Feri.

Menurut Feri, tugas pasangan calon dan tim suksesnya adalah mencari cara untuk bisa memberikan jawaban yang memuaskan banyak pihak dalam debat Capres terbuka.

Debat Capres perdana akan digelar 17 Januari mendatang dengan tema hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme.

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Yusa Djuyandi mengatakan, kedua pasangan Capres/Cawapres perlu menjalani debat dengan menyertakan solusi konkret, untuk mendapatkan simpati publik.

"Pasangan capres dan cawapres perlu mantapkan jawaban dengan menyertakan solusi konkret. Jawabannya tentu jangan terlalu umum atau cenderung formalitas," ujar Yusa dihubungi di Jakarta, Minggu.

Sementara itu, dalam segmen pertanyaan, para kandidat harus menyampaikan pertanyaan berbobot. Lebih jauh dia mengatakan, terbuka peluang bagi kedua kandidat untuk menanyakan persoalan yang selama ini ditudingkan kepada lawannya masing-masing.

Misalnya, Prabowo yang kerap dituding terkait pelanggaran HAM masa lalu, atau pertanyaan tentang penyelesaian kasus hukum di rezim pemerintahan Jokowi seperti kasus Novel Baswedan. Menurut Yusa pertanyaan itu bisa saja dimunculkan. "Publik tentu ingin tahu seperti apa kedua pasangan ini menyikapi soal masalahnya masing-masing," jelasnya. (ant)



PUSAT ISU-Kasus kekerasan yang menimpa Novel Baswedan ada kemungkinan akan jadi pembahasan dalam debat Capres. ANTARA